



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Nomor : 0668/P.01/02/2013  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : **Penawaran Diklat *Public Private Partnership* (PPP)**

6 Februari 2013

Yth. 1. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota  
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota  
3. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

di  
Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan ***Public Private Partnership* (PPP)**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat PPP, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 14 hari sebanyak 5 angkatan, dalam kurun waktu tentative antara bulan Mei s.d. Oktober (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
  - a. PNS yang menangani perencanaan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta dan penganggaran program/kegiatan dari Provinsi/Kabupaten/Kota, maksimal eselon III;
  - b. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - c. Pendidikan minimal S1;
  - d. Umur setinggi-tingginya 5 tahun sebelum pensiun;
  - e. Peserta berkelompok maksimal 5 orang (1 orang ketua Tim dari Bappeda, dan peserta lainnya dari SKPD/DPRD);
  - f. Peserta membawa data potensial program PPP di daerah masing-masing, dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD, dan data lainnya yang diperlukan);
  - g. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
  - h. Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing* terlampir.

Untuk materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat PPP yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 28 Maret 2013**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31931447.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,  
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

  
Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc, Ph.D  
19620323 198903 1 003

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneg PPN/Settama Bappenas.

Yth. :

1. Provinsi Jawa Timur
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Provinsi Jawa Barat
5. Provinsi DKI Jakarta
6. Provinsi Banten
7. Provinsi Bali
8. Provinsi Sumatera Utara
9. Provinsi Aceh
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi Jambi
12. Provinsi Sumatera Barat
13. Provinsi Riau
14. Provinsi Bengkulu
15. Provinsi Sumatera Selatan
16. Provinsi Kalimantan Tengah
17. Provinsi Kalimantan Timur
18. Provinsi Kalimantan Selatan
19. Provinsi Kalimantan Barat
20. Provinsi Sulawesi Utara
21. Provinsi Sulawesi Barat
22. Provinsi Sulawesi Selatan
23. Provinsi Sulawesi Tengah
24. Provinsi Gorontalo
25. Provinsi Papua
26. Kota Medan
27. Kota Banda Aceh
28. Kota Aceh Utara
29. Kota Pekanbaru
30. Kota Palembang
31. Kota Bandar Lampung
32. Kota Padang
33. Kota Pangkal Pinang
34. Kota Bandung
35. Kota Bekasi
36. Kota Depok
37. Kota Tangerang
38. Kota Tangerang Selatan
39. Kota Serang

40. Kota Bogor
41. Kota Cirebon
42. Kota Cimahi
43. Kota Semarang
44. Kota Surakarta
45. Kota Yogyakarta
46. Kota Tegal
47. Kota Surabaya
48. Kota Malang
49. Kota Kediri
50. Kota Denpasar
51. Kota Samarinda
52. Kota Balikpapan
53. Kota Banjarmasin
54. Kota Palangkarya
55. Kota Pontianak
56. Kota Manado
57. Kota Makassar
58. Kota Palu
59. Kota Mataram
60. Kota Jayapura
61. Kabupaten Semarang
62. Kabupaten Kendal
63. Kabupaten Bekasi
64. Kabupaten Lamongan
65. Kabupaten Bogor
66. Kabupaten Karawang
67. Kabupaten Pandeglang
68. Kabupaten Majalengka
69. Kabupaten Agam
70. Kabupaten Bukittinggi
71. Kabupaten Kotawaringin Timur
72. Kabupaten Lombok Tengah
73. Kabupaten Maros
74. Kabupaten Karangasem
75. Kabupaten Payakumbuh
76. Kabupaten Kolaka
77. Kabupaten Banjar
78. Kabupaten Kotabaru
79. Kabupaten Bungo

**KURIKULUM DIKLAT**  
**PERENCANAAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA/ *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* (PPP)**

**I. LATAR BELAKANG**

Masalah pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana dasar). Selain terbatasnya ketersediaan dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, kelembagaan serta aspek-aspek teknis lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengembangan kerjasama antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (ID PPP). Namun demikian mengingat skema program PPP ini adalah baru, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang mampu merencanakan program PPP terutama di daerah.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (Diklat KPS).

**II. TUJUAN UMUM PELATIHAN**

Secara umum pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah swasta/ *Public Private Partnership* (PPP).

**III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN**

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini dinataranya adalah:

- Agar peserta mengerti dan memahami kompleksitas rangkaian kegiatan siklus proyek PPP, komponen serta pelakunya, peran masing-masing pelaku dan keterkaitannya
- Agar peserta mengerti dan memahami perbedaan pokok antara pengadaan proyek pembangunan infrastruktur melalui cara “konvensional” dengan “PPP”
- Agar peserta mengerti dan memahami secara lebih spesifik peran pemerintah daerah dalam mendorong dan mengembangkan proyek PPP, serta peran PPP simpul di sektor atau daerah.

**IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN**

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Public Private Partnership ini adalah:

- Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi, *screening* serta menentukan proyek PPP infrastruktur potensial pada sektor atau daerah masing-masing, yang terkait dengan RPJM sektor atau daerah masing-masing (satu atau dua proyek)

- Peserta pelatihan mampu menyusun draft proposal permintaan bantuan teknis yang ditujukan kepada pemerintah pusat (PDF) untuk “Penyiapan Proyek PPP” berdasarkan identifikasi proyek PPP potensial tersebut.

## V. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

- Pendidikan minimal S1
- Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun
- Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari Provinsi (Bappeda, Dinas dan DPRD)
- Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS)/Staf sektor dari Kabupaten/Kota eselon III, IV dan staf.
- Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah)

## VI. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

## VII. KURIKULUM

1. Kerangka Dasar Diklat *Public Private Partnership* (PPP).
  - a. Kerangka Pelatihan PPP.
  - b. Format Pelatihan.
2. Konsep dan Rasionalitas Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
  - a. Pengertian Partnership.
  - b. Bentuk Partnership.
  - c. Konsep KPS/PPP dalam New Public Management.
  - d. Konsep KPS/PPP lahir dalam Penyediaan Infrastruktur.
  - e. Bentuk KPS/PPP menjadi salah satu Alternatif cara Penyediaan Infrastruktur di Banyak Negara.
3. Struktur Konsesi, Francise/Aftermage dalam KPS/PPP.
  - a. Prinsip-prinsip Dasar Konsesi dan Francising dalam KPS (Value for Money).
  - b. Sejarah Perkembangan Lahirnya Konsesi dan Francising dalam KPS.

- c. Bentuk Struktur Konsesi dalam KPS.
  - d. Bentuk Struktur Struktur Francasing dalam KPS.
4. Bentuk Modalitas Proyek KPS.
    - a. Pengertian bentuk modalitas (BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. Dalam KPS).
    - b. Bentuk modalitas yang dipakai oleh beberapa negara di dunia.
    - c. Kenapa Indonesia memilih salah satu dari modalitas tersebut dalam proyek KPS.
  5. Pemaketan Proyek KPS.
    - a. Karakteristik dan sifat dasar dari BOT, BOO, BOL, DBFO, dll.
    - b. Untung - Rugi dari memilih bentuk kerjasama KPS.
    - c. Perbedaan proyek KPS dengan proyek konvensional.
    - d. Cara pemaketan proyek KPS.
    - e. Bentuk paket KPS yang sesuai untuk Indonesia.
  6. Aspek Peraturan dalam KPS.
    - a. Perpres 56 tahun 2005, Perpres 13 tahun 2010, perpres 67 tahun 2011 tentang KPS.
    - b. Permen PPN No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar KPS.
    - c. Permen Sektor yang berkaitan dengan Kompetensinya.
  7. Aspek Kelembagaan dalam KPS.
    - a. Konsep sistem kelembagaan KPS di beberapa negara.
    - b. Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan KPS Indonesia.
    - c. Beberapa lembaga adhoc dalam KPS seperti KPPI, Tim PKPS, Simpul KPS, dll.
    - d. Lembaga khusus di daerah yang bertugas menjalankan Tupoksi KPS di daerah.
  8. Kebijakan Sektor Dalam KPS/PPP.
    - a. Bentuk Kebijakan Infrastruktur di berbagai negara.
    - b. Berbagai kebijakan KPS (publis VS private) yang dijalankan di berbagai negara.
    - c. Kebijakan sektor pembangunan dalam konteks KPS.
  9. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia (RPJMN/RPJP).
    - a. Kedudukan kebijakan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional.
    - b. Beberapa isu persoalan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional.
    - c. Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.
  10. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPSn di Beberapa Negara.
    - a. Peta kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara.
    - b. Beberapa hal positif dan negatif dari berbagai kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara.
    - c. Beberapa kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk penyediaan infrastruktur dari beberapa pengalaman di beberapa negara.

11. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Indonesia.
  - a. Perlunya kebijakan KPS untuk memenuhi kebutuhan kekurangan infrastruktur di Indonesia.
  - b. Isyu-isyu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur melalui KPS di Indonesia.
  - c. Kekosongan-kekosongan kebijakan yang perlu di isi dalam proyek KPS di Indonesia.
12. Tahap Perencanaan KPS 1 (Identifikasi Proyek KPS: *Needs Assessment*)
  - a. Bentuk-bentuk assessment yang diperlukan dalam mengidentifikasi proyek KPS.
  - b. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi proyek KPS.
  - c. Output apa yang harus dihasilkan dalam mengidentifikasi proyek KPS.
  - d. Dasar hukum dan pedoman (Kepmen PPN 4/2010) yang harus dipakai dalam mengidentifikasi proyek KPS.
13. Tahap Perencanaan KPS 2 (Pemilihan Proyek KPS: Multi Kriteria)
  - a. Kriteria-kriteria apa yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan KPS.
  - b. Teknik-teknik dasar multi kriteria dalam pemilihan proyek KPS.
  - c. Langkah-langkah dasar dalam pemilihan proyek KPS.
  - d. Pedoman dasar dalam pemilihan proyek KPS.
14. Tahap Perencanaan 3 (Penetapan Prioritas Proyek KPS).
  - a. Prosedur penetapan prioritas proyek KPS.
  - b. Adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah).
  - c. Bentuk kerjasama dalam Simpul KPS.
15. Tahap Penyiapan KPS 1 (Struktur Pembiayaan Proyek KPS: PDF)
  - a. Struktur pembiayaan proyek KPS di Indonesia saat ini.
  - b. Bentuk-bentuk alternatif lain pembiayaan proyek KPS di Indonesia.
  - c. Project Development Facility.
16. Tahap Penyiapan KPS 2 (Fungsi dan Peran Project Development Facility).
  - a. Fungsi dan peran Project Development Facility dalam proyek KPS di Indonesia.
  - b. Tugas Project Development Facility dalam proyek KPS.
  - c. Target dan output yang diharapkan PDF dalam proyek KPS di Indonesia.
17. Analisa Kelayakan Proyek KPS.
  - a. Perbedaan kelayakan proyek konvensional dan kelayakan proyek KPS.
  - b. Kelayakan apa yang diperlukan dalam proyek KPS.
  - c. Point-point khusus yang sangat diperlukan dalam proyek KPS di Indonesia.
  - d. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam melakukan analisa kelayakan proyek KPS di Indonesia.
18. Analisa Kelayakan Financial & Investasi Proyek KPS.
  - a. Prinsip-prinsip dasar analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS.

- b. Teknik dasar dari analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS.
  - c. Prinsip-prinsip feasibility, bankable, viability, affordability dalam proek KPS.
19. Analisa Resiko Proyek KPS.
- a. Prinsip-prinsip dasar analisa resiko dalam proyek KPS.
  - b. Jenis-jenis resiko apa yang dihadapi oleh proyek-proyek KPS.
  - c. Dasar hukum yang dipakai dalam mengantisipasi resiko dalam proyek KPS.
  - d. Lembaga atau badan apa yang berhubungan dengan permasalahan resiko dalam proyek KPS.
  - e. Cara-cara yang dilakukan untuk mengalokasikan resiko secara baik dan benar dalam proyek KPS.
20. Analisa Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Proyek KPS.
- a. Prinsip-prinsip dasar dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS.
  - b. Jenis-jenis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS.
  - c. Dasar hukum yang dipakai dalam mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah pada proyek KPS.
  - d. Lembaga atau badan apa (BUPI) yang berkaitan dengan dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS
  - e. Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah secara baik dan benar pada proyek KPS.
21. Studi Kasus KPS 1 (Penyediaan KPS melalui Proyek Air Bersih).
- a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang air bersih (Identifikasi proyek).
  - b. Pengetahuan praktis dari kasus air bersih yang ada (Umbulan, Lampung, Maros, Cimahi Selatan).
  - c. Pelajaran dari kasus air bersih yang ada.
22. Studi Kasus KPS 2 (Pelayanan KPS melalui Proyek Air Bersih).
- a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Air Bersih yang ada selama ini.
  - b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
23. Studi Kasus KPS 3 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan).
- a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang persampahan (Identifikasi proyek: TPA Cinambo dan Legok Nangka di Jawa Barat).
  - b. Pengetahuan praktis dari kasus sampah yang ada (PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gede bage, Kota Bandung).
24. Studi Kasus KPS 4 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan).
- a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Persampahan yang ada selama ini.
  - b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
25. Pembentukan Tim KPS.
- a. Dasar-dasar pertimbangan pembentukan Tim KPS.



- b. Hubungan antara Tim KPS dengan Simpul KPS, PJKP, Institusi lain yang terkait.
  - c. Tugas pokok dan fungsi Tim KPS.
  - d. Dasar hukum pembentukan Tim KPS.
  - e. Pedoman dan tata Kerja Tim KPS.
26. Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS.
- a. Prinsip Dasar Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS.
  - b. Materi Pokok Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS.
  - c. Parameter yang digunakan dalam melakukan uji tuntas Proyek KPS.
27. Persiapan Dokumen Lelang dan Prakualifikasi.
- a. Prosedur persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi proyek KPS.
  - b. Dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS.
  - c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi.
  - d. Isyu-isyu pokok yang dihadapi dalam persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi.
28. Market Sounding dalam Proyek KPS.
- a. Proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS.
  - b. Pokok-pokok yang harus dinegosiasikan dalam proyek KPS.
  - c. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS.
  - d. Jenis-jenis dan cara-cara negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS
29. Proses Tender dalam Proyek KPS.
- a. Proses tender proyek KPS.
  - b. Dasar hukum yang dipakai dalam proses tender pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS.
  - c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam proses tender proyek KPS.
  - d. Isyu-isyu pokok yang dihadapi dalam proses tender proyek KPS.
30. Penyiapan Legal Drafting dalam Proyek KPS.
- a. Bentuk-bentuk kesepakatan dalam proyek KPS.
  - b. Pasal-pasal penting yang harus tercantum dalam proyek-proyek KPS.
  - c. Bentuk-bentuk standard Legal Drafting pada proyek KPS.
  - d. Contoh-contoh legal drafting dari proyek KPS.
31. Monitoring dan Evaluasi Proyek KPS.
- a. Bentuk dan cara yang dapat dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi proyek KPS.
  - b. Permasalahan-permasalahan monitoring dan evaluasi proyek KPS (Kasus dari berbagai Negara & Indonesia).
  - c. Bentuk hasil monitoring dan evaluasi proyek KPS.

### *32. Focus Group Discussion.*

- a. Berdiskusi dan bersinergi dalam membahas isu-isu penting proyek KPS, baik di beberapa Negara maupun di Indonesia.
- b. Berdiskusi dan berinteraksi dalam beberapa kelompok membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh proyek KPS di Indonesia saat ini.
- c. Berdiskusi dan berinteraksi dari keadaan dan pengalaman di daerah masing-masing tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi selama ini.
- d. Berdiskusi dan berinteraksi tentang cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- e. Berdiskusi dan berinteraksi merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada selama ini.

### 33. Kuliah Lapangan.

- a. Kunjungan lapangan selama satu hari penuh (5 sesi) untuk melakukan pengamatan terhadap kasus studi di lapangan.
- b. Melakukan tanya jawab dengan operator atau berbagai pihak (stakeholder) di lapangan terhadap berbagai masalah yang dihadapi selama ini pada proyek KPS
- c. Melakukan liputan gambar, foto, pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak di lapangan.
- d. Membuat risalah kuliah lapangan untuk didiskusikan dan dirangkum sebagai tugas kuliah lapangan.

### 34. Presentasi Kelompok (Legal, Organisasi, Ekonomi/Keuangan, Sosial/Lingkungan, Teknis/Engineering).

- a. Mempresentasikan hasil Kuliah Lapangan dalam suatu Forum Seminar Kelompok.
- b. Menjawab berbagai pertanyaan yang dianggap sebagai isu penting temuan yang diperoleh dalam kuliah lapangan.
- c. Membuat minute of meeting hasil presentasi kuliah lapangan.
- d. Membuat suatu resume hasil pengamatan di lapangan.

### 35. Workshop & Rumusan Kegiatan Pelatihan KPS.

- a. Membuat suatu rumusan kegiatan pelatihan KPS.
- b. Membuat catatan-catatan penting yang harus dilakukan setelah selesai pelatihan KPS.
- c. Membuat suatu rencana kegiatan dari adanya kegiatan Diklat KPS ini untuk Rencana Program Daerahnya masing-masing di masa datang.

### 36. Penutupan Diklat KPS.

- a. Evaluasi Diklat KPS.
- b. Penyerahan Sertifikat KPS.
- c. Penutupan Diklat KPS.

## **IX. KEHADIRAN PESERTA**

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat *Public Private Partnership* (PPP) ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus.

## **VIII. LAMA PELATIHAN**

- a. Lama pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja.
- b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

## **IX. PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat).
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

## **X. METODE EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

## **XI. PROSES PELAMARAN**

Pengiriman nama calon peserta diklat *Public Private Partnership*, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310).

Untuk keterangan lebih lanjut dalam pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui email: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) atau membuka situs: [www.Pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.Pusbindiklatren.bappenas.go.id).

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS**  
**FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR**  
**DALAM NEGERI**

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):..... NIP: .....
2. Tempat/tanggal lahir : ..... Jenis Kelamin ..... (L/ P).....
3. Alamat rumah : .....  
Kab/Kota/Prov ..... Kode Pos .....  
Telpon/Fax/HP ( ..... ) .....
4. e-mail address : .....
5. Nama instansi asal : .....
6. Nama Unit Kerja : .....
7. Alamat Unit Kerja : .....  
Kab/Kota/Prov..... Kode Pos .....  
Telpon/Fax/HP ( ..... ) .....
8. Jabatan sekarang : ..... Gol : .....
9. TMT PNS 100%, pada Gol. III/a : ...../...../..... Masa kerja: .....
10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3 PT : .....  
Fakultas (S1/S2/S3) : ..... Jurusan: .....  
Lulus tahun (S1/S2/S3) : ..... IPK: ..... skala: .....
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak .....
12. Pilihan diklat yang akan diikuti :  
.....  
.....
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :  
.....  
.....

*Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.*

Menyetujui,  
Pejabat Eselon II : .....

..... tgl ..... 20 .....  
Yang bersangkutan,

ttd  
(.....)  
Nama Jelas

ttd  
(.....)  
Nama Jelas

**KOP INSTANSI**  
**(Surat Kesiediaan *Cost-Sharing*)**

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor : .....  
Lamp. : .....(berkas)  
Hal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat  
a.n. 1. Sdr. X  
2. Sdr. Y  
3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas  
Di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ...../...../2013, tentang ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

(.....)  
NIP: .....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

**Catatan:**

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa:

- a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi;
- b. Uang saku.

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** ditanggung oleh instansi asal.